

PENGARUH PEMASANGAN BALIHO TERHADAP KEPUTUSAN MEMILIH CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**Safaruddin^{1*}, Netari Mulyawati², Hema Malini³**^{1,2} Universitas Mahakarya Asia³ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwisakti^{1,2} Jl. Jend. A Yani Kec. Baturaja Timur, Sum-Sel, Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111, Indonesias³ Jl. Professor Dokter Hamka No.541-A, Sukaraya, Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32112, Indonesia

Email: safaruddintohir@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received :

5 Desember 2024

Revised :

6 Desember 2024

Accepted :

7 Desember 2024

Kata Kunci: Sosialisasi;
Calon anggota Legislatif;
Keputusan Memilih**Keywords:** Socialization;
Prospective Legislative
Members; Decision to Vote**Abstrak**

Anggota legislatif merupakan elemen penting bagi masyarakat dalam kehidupan bernegara, karena dewan perwakilan rakyat merupakan lembaga formal negara sebagai tumpuan dan harapan masyarakat. Untuk itu mereka memerlukan anggota legislative yang senantiasa berkomitmen mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan jalinan kerjasama yang baik, membangun sinergitas yang kuat, dan menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing, kemudian responsive mendengar masukan dan kritikan dalam mengemban amanat rakyat. Umumnya mereka bertugas selama lima tahun, dan atau mengikuti mekanisme dan kebijakan politik yang berlaku. Karena hal tersebutlah maka masyarakat akan mencari informasi dan mengenali calon anggota legislatif yang akan dipilihnya. Para calon anggota legislatif yang memilih baliho untuk memperkenalkan dirinya dengan adanya pertimbangan hemat biaya dan waktu karena tanpa berjumpa masyarakat dapat mengenal calon anggota legislatif tersebut. Jika dikaitkan dengan fungsi baliho ditemukan banyak fenomena pengerusakan dan pengabaian yang dilakukan oleh masyarakat. Agar memperoleh anggota legislatif yang sesuai dengan yang diinginkan, ada beberapa faktor yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh masyarakat sebelum memutuskan calon anggota legislatif mana yang akan dipilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemasangan baliho terhadap keputusan masyarakat dalam memilih calon anggota legislative pada kabupaten Ogan Komering Ulu.

Abstract

Legislative members are an important element for society in national life, because the people's representative council is a formal state institution as a mainstay and hope for the community. For that, they need legislative members who are always committed to the welfare of the community by improving good cooperation, building strong synergy, and carrying out tasks according to their respective fields, then responsive to input and criticism in carrying out the people's mandate. Generally, they serve for five years, and/or follow the applicable political mechanisms and policies. Because of this, the community will seek information and recognize the legislative candidates they will choose. Prospective legislative members who choose billboards to introduce themselves with the consideration of saving costs and time because without meeting the community can get to know the prospective legislative members. When associated with the function of billboards, many phenomena of destruction and neglect are found by the community. In order to obtain legislative members who are in accordance with what is desired, there are several factors that the community may consider before deciding which legislative candidates to choose. This study aims to determine the effect of installing billboards on the community's decision in choosing legislative candidates in Ogan Komering Ulu Regency.

PENDAHULUAN

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, public policy. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya (Budiardjo, 2009). Selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah.

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya. Di kebanyakan negara yang mempraktekkan demokrasi, pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik dalam tenggang waktu tertentu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari sebuah demokrasi. Pemilu dianggap sebagai indikator utama negara demokrasi, karena dalam Pemilu rakyat menggunakan suaranya, melaksanakan hak politiknya dan menentukan pilihannya secara langsung dan bebas.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak). Rakyat menjadi factor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat (teori bahwa negara ada sebagai manifestasi kehendak tuhan di muka bumi yang menjelma dalam aspirasi rakyat).

Sesuatu yang tidak bisa dilepaskan ketika membahas tentang partisipasi adalah golput untuk menyebut bagi pemilih yang tidak menggunakan haknya. Fenomena golput ini ada di setiap pemilihan umum. Di hampir setiap pemilihan, jumlah golput akan dianggap sehat jika jumlah golput dalam kisaran angka 30 persen, meski banyak pemilihan jumlah golputnya melampaui titik itu, mencapai kisaran 40 persen bahkan ada yang lebih. Meminjam tulisan muh Isnaini, Eep Saefulloh Fatah mengklasifikasikan golput atas empat golongan.

Pertama, golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah. Kedua, golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu). Ketiga, golput politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Keempat, golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.

Jika dilihat faktor penyebab seseorang tidak menggunakan hak pilihnya ada beberapa faktor. Pertama faktor teknis; ialah adanya kendala teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti pada hari pencoblosan pemilih sedang sakit, ada kegiatan yang lain, ada diluar daerah, atau berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Termasuk kendala pekerjaan sehari-hari pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti misalkan warga Kabupaten Kulonprogo yang bekerja diluar negeri atau luar daerah (merantau) sehingga ketika ada pemilu tidak sempat ikut berpartisipasi. Kedua faktor politik; faktor ini adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan, ketidak percaya dengan partai. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Beredarnya berita negatif yang menerpa para wakil rakyat, yang notabene adalah para politisi, sedikit banyak berpengaruh pada pandangan masyarakat terhadap pemilu. Kondisi lain adalah tingkah laku politisi yang banyak berkonflik mulai konflik internal partai dalam mendapatkan jabatan strategis di partai, kemudian konflik dengan politisi lain yang berbeda partai. Konflik seperti ini menimbulkan anti pati masyarakat terhadap partai politik.

Kedua faktor sosialisasi; Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini di sebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala dusun, memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda. Sehingga menuntut penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta seluruh stakeholder untuk

terus selalu menyebarluaskan informasi seputar pemilu secara massif. Ketiga faktor administrasi; adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang terkadang membuat pemilih tidak ikut dalam pemilihan. Meskipun seorang dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas diri, meskipun belum tercatat dalam DPT dengan syarat hanya di alamat sesuai dengan KTP. Menjadi persolan jika tidak mempunyai KTP.

Faktor lainnya yang tidak kalah menentukan adalah keakuratan data pemilih atau data kependudukan. Sebagaimana diketahui bahwa tingkat partisipasi diukur dengan melihat jumlah kehadiran pemilih dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar. Jika validitas DPT rendah atau ada banyak data ganda, tidak valid maka otomatis banyak warga terdaftar yang tidak hadir.

Terjadinya data ganda dalam DPT mempengaruhi tingkat partisipasi. Contohnya adalah warga Sentolo yang secara de jure masih tercatat sebagai warga Sentolo, tetapi sebenarnya yang bersangkutan sudah tidak lagi di Sentolo. Atau seorang warga Sentolo yang sudah pindah domisili tetapi tidak pernah memperbarui data kependudukannya. Ada warga yang memiliki dua identitas dan tinggal di dua wilayah berbeda dan terdaftar di dua tempat tersebut. Para petugas PPDP/Pantarlil juga tidak berani mencoret pemilih tersebut karena secara de jure tercatat, dan keluarga juga tidak merekomendasikan untuk dicoret.

Bahwa partisipasi dipengaruhi oleh keakuratan data kependudukan dapat dilihat dalam metode pendaftaran pemilih. Keakuratan data penduduk dengan pendaftaran pemilih secara de facto menghasilkan partisipasi yang lebih baik, dibanding dengan metode de jure. Dibawah ini adalah data tingkat partisipasi pemilih pemilu legislatif dan pemilu presiden 2004, 2009, 2014 beserta Pilkada 2006 dan 2011. Dalam memasarkan suatu produk diperlukan promosi (Tyas, 2009), promosi adalah komunikasi antara penjual dan pembeli atau pihak-pihak lain dalam saluran untuk memengaruhi sikap dan perilaku (McCarthy dan Perreault yang dikutip (Tampubolon, 2018). Hal ini dilakukan untuk mengenalkan produk kepada konsumen, sehingga konsumen dapat mengetahui keunggulan produk yang akan dibelinya.

Bagi mahasiswa promosi tempat kos sangat diperlukan, selain mendapatkan informasi yang dibutuhkan juga dapat membandingkan kelebihan tempat kos yang satu dengan yang lainnya. Pengambilan keputusan pada dasarnya adalah proses pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih dengan harapan akan menghasilkan sebuah keputusan terbaik. (Kotler, P., & Armstrong, 2014) mengemukakan bahwa keputusan pembelian adalah bagian dari perilaku konsumen, perilaku konsumen yaitu studi tentang bagaimana individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka.

Pada dasarnya, proses pengambilan keputusan pembelian yang akan dilakukan oleh konsumen akan melalui beberapa tahap yang disebut dengan proses pengambilan keputusan model lima tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian (Kotler, P., & Keller, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menggunakan variabel dalam penelitian dengan menggunakan skala likert yang mempunyai interval 1-5. Untuk Jawaban yang mendukung pernyataan diberi skor tertinggi dan untuk jawaban yang tidak mendukung pernyataan diberi skor terendah, adapun penentuan skor tersebut adalah sebagai berikut.

1. Untuk jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 5
2. Untuk jawaban Setuju (S) diberi skor 4
3. Untuk jawaban Ragu-ragu (R) diberi skor 3
4. Untuk jawaban Tidak Setuju (TS) diberi skor 2
5. Untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1

Metode Analisis Data. Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan, karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian. Kesalahan dalam menentukan alat analisis dapat berakibat fatal terhadap kesimpulan yang dihasilkan dan hal ini akan berdampak lebih buruk lagi terhadap penggunaan dan penerapan hasil penelitian tersebut.

Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teknik analisis mutlak diperlukan bagi seorang peneliti agar hasil penelitiannya mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pemecahan masalah sekaligus hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Uji koefisien regresi digunakan untuk menguji tingkat signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis Regresi Linier sederhana adalah menganalisis nilai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melakukan pengamatan langsung pada tempat-tempat pemasangan baliho di Kabupaten Ogan Komering Ulu, adapun beberapa dokumentasi pemasangan baliho yang telah peneliti lakukan terlihat pada gambar 1 dan 2 dibawah ini.



Gambar 1. Lokasi Pemasangan Baliho di Kelurahan Sekarjaya

Gambar 1 memperlihatkan beberapa baliho terpasang di daerah pemilihan 1 Baturaja Timur tepatnya di Kelurahan Sekarjaya.



Gambar 2. Lokasi Pemasangan Baliho di Perumahan RSS Sriwijaya

Gambar 2 menunjukkan pemasangan baliho di daerah pemilihan 1 Baturaja Timur tepatnya di Perumahan RSS Sriwijaya. Melalui penelitian berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa hasil analisis data dan pengujian hipotesis sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Analisis Data

No	T hitung	T tabel
	2.960	1.671

Uji t dalam variabel pemasangan baliho (X) terhadap keputusan memilih (Y) memiliki nilai sig. $t < \alpha$ yaitu sebesar $0,004 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $2,960 > 1,671$, maka nilai hipotesis nol (H_0) di tolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pemasangan baliho (X) terhadap keputusan memilih (Y) calon anggota legislative.

Berdasarkan Persamaan garis regresi yakni $Y = a + b_1X_1$ dimana $Y = 5,684 + 0,343X$ yang penjelasannya sebagai berikut :

1. Merupakan konstanta yang besarnya 5,684 menyatakan bahwa jika variable independent (pemasangan baliho) sebesar 0 (nol), maka nilai variable dependent (keputusan memilih) sebesar 5,684.
2. Merupakan koefisien regresi dari X sebesar 0,343 menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan variabel X dengan asumsi variabel lain dianggap konstan maka hal ini akan berpengaruh peningkatan besarnya Y sebesar 0,343.

KESIMPULAN

Terdapat pengaruh yang signifikan pemasangan baliho terhadap keputusan memilih calon anggota legislatif. Secara parsial juga terdapat pengaruh yang signifikan penempatan lokasi (strtegis) pemasangan baliho

terhadap keputusan memilih calon anggota legislatif pada pemilu 2024. Pengurus Partai Politik pengusung calon anggota legislatif sebaiknya mempunyai perencanaan kegiatan sosialisasi yang matang dan sistematis, sehingga tujuan yang dijalankan dapat tercapai, dan kebutuhan serta kepuasan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fariied Ali, 1997. Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ghozali, I. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indroharto, 1993. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradian Tata Usaha Negara; Buku II, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Murtir Jeddawi, 2012. Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Total Media.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT. Indeks
- Sjahan Basah, 1992. Perlindungan Hukum atas Tindak Pidana Admnistrasi Negara, Bandung: Alumni.